



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

| | |
|-----------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2020-2021 |
| Masa Sidang ke- | : V (lima) |
| Sifat Rapat | : Terbuka. |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Dengan | : Perpustakaan Nasional RI. |
| Hari/Tanggal | : Rabu, 2 Juni 2021. |
| Pukul | : 09.00.00 – Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual menggunakan Media Zoom) |
| Pimpinan Rapat | : Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM /Wakil Ketua Komisi X DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dadang Prayitna, S.I.P, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI. |
| Acara | : Pembahasan Pendahuluan RKA K/L dan RKP K/L Tahun Anggaran 2022 |
| Hadir Komisi X DPR RI | : 36 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI. |
| Hadir Pemerintah | : Muhammad Syarif Bando /Kepala Perpustakaan RI beserta jajarannya. |

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul **09.15 WIB** oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustakaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Berdasarkan Surat Nomor: S-361/MK.02/2021 Dan B 238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021, perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2022, Perpustakaan RI mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN TA 2022 sebesar **Rp.667.521.289.000,- (Enam ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Per Program

| | |
|---|-----------------------------|
| Program Perpustakaan dan Literasi | Rp.430.894.811.000,- |
| Program Dukungan Manajemen dan Literasi | Rp.236.626.478.000,- |
| Total | Rp.667.521.289.000,- |

Per Jenis Belanja

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Belanja Barang | Rp.373.431.827.000,- |
| Belanja Modal | Rp.93.527.060.000,- |
| Belanja Gaji (001) | Rp.140.263.726.000,- |
| Belanja Operasional (002) | Rp.60.298.676.000,- |
| Total | Rp.667.521.289.000,- |

2. Perpusnas RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar:
 - a. Rp.2.453.487.633.000,- (*Dua triliun empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) yang disampaikan melalui surat No.1401/2/PRC.03.00/II.2021 tanggal 11 Februari 2021 kepada Kemenkeu RI dan Bappenas RI
 - b. Rp.54.184.791.000,- (*Lima puluh empat miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) yang disampaikan melalui surat No.3828/1/PRC.03.00/V.2021 tanggal 17 Mei 2021 kepada Kemenkeu RI dan Bappenas RI, yang digunakan untuk:
 - 1) Penguatan pelayanan koleksi digital Perpusnas di wilayah perbatasan dan perguruan tinggi dengan nilai usulan Rp.43.260.740.000,- (*Empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*)
 - 2) Percepatan digitalisasi naskah dengan nilai usulan Rp.10.924.051.000 (*sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu rupiah*)

3. Terhadap pagu indikatif Perpusnas RI pada RAPBN TA 2022, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Mendukung usulan tambahan anggaran Perpusnas RI yaitu sebesar:
 - 1) Rp.2.453.487.633.000,- (*Dua triliun empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) yang disampaikan melalui surat No.1401/2/PRC.03.00/II.2021 tanggal 11 Februari 2021 kepada Kemenkeu RI dan Bappenas RI
 - 2) Rp.54.184.791.000,- (*Lima puluh empat miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) yang disampaikan melalui surat No.3828/1/PRC.03.00/V.2021 tanggal 17 Mei 2021 kepada Kemenkeu RI dan Bappenas RI.
 - b. Mendorong Perpusnas RI untuk menyiapkan program dan kegiatan pada RAPBN TA 2022 guna mendukung (i) layanan kepada pemustaka, (ii) meningkatkan kegemaran membaca, (iii) wahana belajar sepanjang hayat; (iv) tempat menghimpun khazanah intelektual budaya bangsa, dan (v) memperbesar akses buku bacaan di daerah, terutama daerah 3T, yang dibutuhkan pada kenormalan baru.

- c. Mendorong Perpustakaan RI untuk memaksimalkan isu terkini bidang perpustakaan sebagai *co-working space*, *marketplace* ekosistem literasi, inisiator *digital publishing*, repositori nasional dan pendukung percepatan pemulihan ekonomi, agar perpustakaan dapat adaptif terhadap dinamika perubahan yang terjadi, disesuaikan dengan kondisi daerah.
 - d. Mengingatkan kepada Perpustakaan RI untuk menyampaikan alokasi DAK fisik subbidang perpustakaan RAPBN TA 2022 serta rincian peruntukannya, dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik pada tahun-tahun sebelumnya.
 - e. Mendorong Perpustakaan RI untuk konsisten membuat kebijakan terobosan guna meningkatkan budaya literasi terutama upaya percepatan akses membaca yang bermutu, murah dan merata bagi masyarakat dalam hal ketersediaan buku untuk mengubah stigma negatif bahwa orang Indonesia tidak suka membaca, sesuai dengan amanat UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan UU No 13 Tahun 2018 tentang SSKCKR.
 - f. Komisi X mendorong Perpustakaan RI untuk menghadirkan literatur yang dapat meluruskan kesimpangsiuran informasi dan menjadi referensi sejarah nasional, salah satunya dengan program penguatan literasi sejarah pesantren (sebutan lain) dan kyai (sebutan lain) yang ikut berkontribusi dalam pembentukan negara.
4. Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan RI untuk menyampaikan usulan modul pembelajaran guna meningkatkan literasi yang akan digunakan dalam kurikulum Perguruan Tinggi.
 5. Komisi X DPR RI dan Perpustakaan RI sepakat akan melakukan pendalaman terhadap penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) Perpustakaan RI dalam waktu dekat, sebelum disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.
 6. Komisi X DPR RI dan Perpustakaan RI sepakat seluruh pandangan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI menjadi bahan pembahasan dan pendalaman pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.55 WIB

KEPALA PERPUSNAS RI



M. SYARIF BANDO

KETUA RAPAT,



DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM